



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KOTA PEMATANG SIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk periode satu tahun sebagai perjabaran dari Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2025.

Kami berharap dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Pematangsiantar, sehingga pembangunan di Kota Pematangsiantar dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pematangsiantar.

Pematangsiantar, Agustus 2024

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kota Pematangsiantar


DANAR FAMBURI DAMANIK, S.STP, M.Si

Pemula

NIP. 19841024 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Daerah	20
2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2021	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/ Provinsi	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	
5.1. Catatan Penting	51
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	51
5.3. Rencana Tindak Lanjut	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2022 – 2027, dan merujuk kepada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2025. hal tersebut bertujuan agar tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas fungsi pemerintah antar daerah maupun pusat, serta menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Pematangsiantar Tahun 2025. RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

RANWAL-RENJA Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025 dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berwawasan *bottom-up planning* guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dukungan unsur *stakeholder* dalam mengimplementasikan RENJA Dinas Arsip dan Perpustakaan, dan agar tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga dalam penyusunan RANWAL-RENJA Dinas Arsip dan Perpustakaan berkaitan erat dengan proses forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penyusunan RANWAL-RENJA Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025, merupakan hasil usulan dari masing-masing bidang dan sekretariat, serta usulan dari

masyarakat dalam Musrenbang Kota Pematang Siantar Tahun 2025, sehingga rencana program dan kegiatan merupakan cerminan tupoksi masing –

masing bidang atau subbagian dan seksi berdasarkan skalaprioritas, kebutuhan mendesak dan isu permasalahan pendidikan saat ini.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 disusun berdasarkan: Dasar Hukum OPD: Pembentukan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, dengan merdesan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005 – 2025;
 16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 – 2032;
 17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027;

18. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar merupakan suatu lembaga yang siap menampung, mengolah dan menyimpan semua produk – produk hasil budaya manusia dan merupakan perantara yang dapat memberikan kesempatan bagi semua insan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan – perubahan yang terjadi dan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang.

Oleh sebab itu Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar harus dibenahi sedemikian rupa setiap tahun guna membantu peningkatan kualitas Pelayanan dan Sumber daya Manusia (SDM) profesional untuk menunjang pembangunan dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Kearsipan dan Perpustakaan dengan cara penambahan Koleksi Buku sesuai dengan Perkembangan IPTEK, peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis IT (Informasi Teknologi), peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) secara menyeluruh sampai tingkat kelurahan dan sekolah-sekolah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Perencanaan Kerja Tahunan (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Rencana Renja) serta Sistematika Penyusunan Renja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (Renja) OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap RKPD Tahun 2024 serta Penelaahan Ujulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Teraahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Melampirkan penjelasan tentang sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan yang berasal dari APBD Daerah, APBD Provinsi atau APBN serta nominal jumlah dana Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Merupakan Bab Penutup yang berisikan Uraian Penutup tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranwal Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan sampai dengan tahun 2023 diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025. Evaluasi Renja Tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan dimaksud dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan arsip dan perpustakaan terus mengalami peningkatan. Meskipun banyak ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar telah mengevaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keeluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renja Tahun 2023		Pencapaian	
		Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1	Usulan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B	4.843.989.384		4.719.966.852		97,26 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.189.074	100%	1.746.875	100 %	99,48%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	1.189.074	4 dokumen	2.768.875	100 %	99,48 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	188%	3.023.745.554	100%	3.005.989.538	188 %	99,41%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang / 14 bulan	2.304.988.580	32 Orang / 14 bulan	2.867.779.820	100%	99,41%
	Penyediaan Administrasi	12	117.315.000	12 bulan	117.000.000		99,73%

	Pelaksanaan Tugas ASN	bulan				100 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.441.004	1 laporan	1.219.816,00	98 %	84,60%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	638.633.939	100%	597.819.732	98 %	93,61%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	1 paket	10.992.750	1 paket	10.045.330	100%	95,13%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	215.602.264	3 Paket	189.230.114	100%	87,66%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	11.996.104	1 paket	8.431.890	100%	70,28%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	4.650.000	1 paket	4.554.900	100%	93,90%
	Penyediaan Barang / Cetak dan Penggandaan	2 paket	12.162.512	2 paket	10.838.742	100%	88,98%
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	2 laporan	352.219.800	2 laporan	343.718.163	100%	97,59
	Penata usahaan amp dokumen pada SKPD	1 dokumen	21.000.000	1 dokumen	21.000.000	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemungutan Unsur Pemerintahan Daerah	100%	381.228.986	100%	338.215.224	100%	88,71%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	101.158.000	12 laporan	76.286.108	100 %	75,42%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	12.860.000	1 laporan	12.756.116	100%	98,18%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	267.220.000	12 laporan	249.176.000	100 %	93,20%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemerintahan Daerah	100%	91.376.088	100%	76.338.667	100 %	83,72%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	39.630.000	5 unit	36.254.579,00	100%	91,51%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	2 unit	51.720.000	2 unit	43.804.482	100%	85,04%
8	Program Pembinaan Perpustakaan	18,56 %	564.037.339		551.107.792	21,23%	97,71%

II	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	944.827.888	100%	551.187.792	100%	67,71%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Layanan	90.200.000	1 layanan	66.660.000	100%	99,48%
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75 orang	67.627.589	174 orang	55.907.703	232%	84,03%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	700 eksemplar	387.000.000	700 Eksemplar	395.430.000	200 Eksemplar	99,80%
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Daerah Khusus	8 Nasabah	71.600.402	8 Nasabah	67.600.792,00	8 Nasabah	93,12%
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	71.600.402	100%	67.600.792,00	100%	93,12%
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	200 Eksemplar	71.600.402	200 Eksemplar	67.600.792,00	100%	93,12%
IV	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	440 Arsip	79.133.805	462 arsip	78.408.032,90	193,64 %	99,98%
	Pemantauan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	100%	79.133.805	100%	78.408.032,90	100%	99,98%
	Pencatatan, Penetapan dan Pelaksanaan Pemantauan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun	440 Arsip	79.133.805	462 Arsip	78.408.032,90	193,64 %	99,98%

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya SDM Aparatur yang terlatih
3. Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan keuangan
4. Tersedianya Peraturan Wali kota (Perwa) tentang Kearsipan
5. Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan sekolah dan kelurahan

6. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar
7. Bertambahnya jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kota Pematang Siantar
8. Bertambahnya jumlah buku bacaan di Perpustakaan Umum Daerah Kota Pematang Siantar

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah :

1. Menambah jumlah pegawai untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional (pustakawan dan arsiparis).
2. Meningkatkan kegiatan pembinaan perpustakaan sekolah, kelurahan dan perpustakaan khusus.
3. Menyesuaikan (mengurangi/menambah) anggaran dengan target capaian program dan kegiatan.
4. Mengutamakan program/kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Arsip dan Perpustakaan.
5. Menambah target capaian program/kegiatan yang melebihi target capaian program/kegiatan.

Capaian Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2023, dan Realisasi Rensira Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2022 – 2027 disajikan dalam Tabel T.C.29 berikut ini.

2.23.02.2.01.01	Keperawatan Lintas Profesi dan Lintas Ruang	Asuhan, Rencanakan, Terapkan, Mengkaji dan Evaluasi Asuhan Keperawatan yang Dihasilkan dan Dokumentasi						100 orang	
2.23.02.2.01.02	Keperawatan Sakep Rutin	Perencanaan yang Diakuisi, Pengkajian dan Pengukuran serta Monitoring dan Kalkulasi, dan Evaluasi Keperawatan	700 ekstremitas	700 ekstremitas	700 ekstremitas	700 ekstremitas	100 ekstremitas	700 ekstremitas	
2.23.02.2.01.03	Pengkajian dan Pengukuran Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	200 ekstremitas	200 ekstremitas	200 ekstremitas	200 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	
2.23.02.2.01.04	Perawatan Perawatan Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	
2.23.02.2.01.05	Pengkajian dan Pengukuran Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	
2.23.02.2.01.06	Perawatan Perawatan Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	
2.23.02.2.01.07	Pengkajian dan Pengukuran Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	
2.23.02.2.01.08	Perawatan Perawatan Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	
2.23.02.2.01.09	Pengkajian dan Pengukuran Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	
2.23.02.2.01.10	Perawatan Perawatan Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	
2.23.02.2.01.11	Pengkajian dan Pengukuran Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	
2.23.02.2.01.12	Perawatan Perawatan Sakep Rutin	Asuhan Perawatan Sakep Rutin, Pengkajian dan Pengukuran, dan Dokumentasi	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	100 ekstremitas	

[illegible]

2.23.01.2.02.01	Penelitian Uji dan Tinjauan Ahli	Survei Jurnal, Daring yang Berbasis Jurnal, Tinjauan Ahli	14 bulan	14 bulan	12 orang/14 bulan	100%	14 bulan	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan dan Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Tindakan Ahli	Jurnal, Tinjauan Ahli, Penelitian Ahli, Penelitian Pemeriksaan Tindakan Ahli	12 bulan	12 bulan	12 orang/12 bulan	100%	12 bulan	
2.23.01.2.02.03	Kontribusi dan Peranan Laboratorium dalam Tindakan Tindakan Ahli	Jurnal, Tinjauan Ahli, Penelitian Ahli, Penelitian Pemeriksaan Tindakan Ahli	1 bulan	1 bulan	1 orang/1 bulan	100%	1 bulan	
2.23.01.2.02.04	Survei dan Pemeriksaan Tindakan Ahli	Jurnal, Tinjauan Ahli, Penelitian Ahli, Penelitian Pemeriksaan Tindakan Ahli	12	12	1 orang/12 bulan	100%	12	
2.23.01.2.02.05	Penelitian dan Pemeriksaan Tindakan Ahli	Jurnal, Tinjauan Ahli, Penelitian Ahli, Penelitian Pemeriksaan Tindakan Ahli	1 bulan	1 bulan	1 orang/1 bulan	100%	1 bulan	
2.23.01.2.02.06	Penelitian dan Pemeriksaan Tindakan Ahli	Jurnal, Tinjauan Ahli, Penelitian Ahli, Penelitian Pemeriksaan Tindakan Ahli	2 bulan	2 bulan	2 orang/2 bulan	100%	2 bulan	
2.23.01.2.02.07	Penelitian dan Pemeriksaan Tindakan Ahli	Jurnal, Tinjauan Ahli, Penelitian Ahli, Penelitian Pemeriksaan Tindakan Ahli	1 bulan	1 bulan	1 orang/1 bulan	100%	1 bulan	
2.23.01.2.02.08	Penelitian dan Pemeriksaan Tindakan Ahli	Jurnal, Tinjauan Ahli, Penelitian Ahli, Penelitian Pemeriksaan Tindakan Ahli	1 bulan	1 bulan	1 orang/1 bulan	100%	1 bulan	
2.23.01.2.02.09	Penelitian dan Pemeriksaan Tindakan Ahli	Jurnal, Tinjauan Ahli, Penelitian Ahli, Penelitian Pemeriksaan Tindakan Ahli	2 bulan	2 bulan	2 orang/2 bulan	100%	2 bulan	
2.23.01.2.02.10	Penelitian dan Pemeriksaan Tindakan Ahli	Jurnal, Tinjauan Ahli, Penelitian Ahli, Penelitian Pemeriksaan Tindakan Ahli	1 bulan	1 bulan	1 orang/1 bulan	100%	1 bulan	

2.23.01.2.20	Penelitian Jasa Penyediaan Jasa Pemungutan Uang Pemukiman Candi	100						100		
2.23.01.2.20.02	Penelitian Jasa Pemungutan Uang Pemukiman Candi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
2.23.01.2.20.03	Penelitian Jasa Pemungutan Uang Pemukiman Candi	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
2.23.01.2.20.04	Penelitian Jasa Pemungutan Uang Pemukiman Candi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
2.23.01.2.20	Penelitian Jasa Penyediaan Jasa Pemungutan Uang Pemukiman Candi	100						100		
2.23.01.2.20.01	Penelitian Jasa Penyediaan Jasa Pemungutan Uang Pemukiman Candi	1 unit esekda model & 2 unit model	1 unit esekda model & 2 unit model	1 unit esekda model & 2 unit model	1 unit esekda model & 2 unit model	1 unit esekda model & 2 unit model	1 unit esekda model & 2 unit model	1 unit esekda model & 2 unit model	1 unit esekda model & 2 unit model	
2.23.01.2.20.02	Penelitian Jasa Penyediaan Jasa Pemungutan Uang Pemukiman Candi	2 unit model	2 unit model	2 unit model	2 unit model	2 unit model	2 unit model	2 unit model	2 unit model	
2.23.01.2.20.03	Penelitian Jasa Penyediaan Jasa Pemungutan Uang Pemukiman Candi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
2.23.01.2.20.04	Penelitian Jasa Penyediaan Jasa Pemungutan Uang Pemukiman Candi	30.000 esekda	30.000 esekda	30.000 esekda	30.000 esekda	30.000 esekda	30.000 esekda	30.000 esekda	30.000 esekda	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar secara rutin setiap tahun maupun lima tahun kedepan, maka sumber pembiayaannya berasal dari :

Dana Alokasi Umum sedangkan Pembelanjaan Rutinnya terbagi atas :

- a. Belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai.
- b. Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Analisis Lingkungan Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan arsip dan perpustakaan;
2. Penyusunan rencana strategis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan;
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang arsip dan perpustakaan;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang arsip dan perpustakaan;
7. Pelaksanaan urusan kesekretariatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
8. Pelaksanaan pembinaan masyarakat arsip dan perpustakaan;
9. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan arsip dan perpustakaan di lingkungan pemerintah kota Pematangsiantar;
10. Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan arsip dan koleksi daerah dan nasional;
11. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Anasir dan Perpustakaan Tahun sesuai dengan indikator kinerja yang menjadi target Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel T.C.30.berikutini:

Tabel T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
	Indikator Program													
	Perpustakaan													
1	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per tahun (Pencatukan Usia 5-60 tahun)			17,56%	18,56%	19,17%	19,80%		18%					
2	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat			60 %	65 %	60 %	65 %		70 %					
	Arsip													
1	Persentase Jumlah Peningkat Daerlat yang di Tata Arsip Ditamainya			34%	30%	45%	60%		34%					

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Perangkat Daerah mengalami peningkatan walaupun masih ada realisasi kinerja belum sesuai dengan target tetapi di tahun 2023 diperkirakan semua target kinerja Perangkat Daerah yang terdapat di dalam IKK (Indikator Kinerja Kunci) akan tercapai.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam setiap program/kegiatan, seperti mengundang narasumber dalam kegiatan bimtek perpustakaan dan kearsipan, selama tahun 2016 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar mendapatkan bantuan dari Perpusnas 1 unit mobil Perpustakaan Keliling, bantuan buku koleksi Mobil Perpustakaan Keliling sebanyak 250 judul/500 eksemplar, dan koleksi buku layanan umum sebanyak 925 judul/1850 eksemplar, dan pada Tahun 2023 juga mendapatkan bantuan Gerobak Baca berupa Betor dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan mengalami permasalahan dan hambatan, antara lain:

- ❖ Belum tersedianya dan terbatasnya dana dalam pelaksanaan program kerja rutin, sehingga ada program kerja yang tidak dapat dilaksanakan seperti pengelolaan dan pemeliharaan Arsip, dan program sosialisasi kegemaran membaca.
- ❖ Kurangnya tenaga terampil khususnya fungsional yang merupakan pendukung dalam pelaksanaan program kerja, misalnya tenaga pustakawan dan arsiparis.
- ❖ Pegawai yang memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informasi Komputer dalam pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan masih terbatas.
- ❖ Kurangnya kesadaran pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar karena kurangnya pemahaman pengelolaan arsip.

2.3.3. Dampak permasalahan dan hambatan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Permasalahan dan hambatan tersebut di atas berdampak pada kurang maksimalnya kinerja capaian yang telah ditetapkan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan, hal ini tentu mempengaruhi pencapaian visi misi Wali Kota Pematang Siantar terutama misi Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkaitan juga kepada SDGs (Sustainable Development Goals) dalam Peningkatan sarana pendukung pendidikan.

Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dan juga Pengolahan arsip khususnya arsip statis juga mengalami hambatan disebabkan permasalahan yang terjadi, SPM (Standar Pelayanan Minimal) di bidang Pelayanan kearsipan dan perpustakaan sampai sekarang belum ditetapkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan diantaranya adalah :

- ❖ Sarana prasarana arsip dan perpustakaan masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja pelayanan, diantaranya adalah sarana pengolahan arsip dan fasilitas pengembangan perpustakaan digital
- ❖ Kurangnya pengetahuan pegawai tentang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi Komputer (TIK), seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan Inisite (aplikasi perpustakaan)
- ❖ Masih kurangnya kesadaran/kemauan pegawai untuk meningkatkan potensi diri dalam melaksanakan pelayanan prima

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan antara lain :

- ❖ Adanya motivasi Aparat / Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok
- ❖ Dukungan dari Pemerintah Kota Pematang Siantar sesuai Visi dan Misi Kota Pematang Siantar

- ❖ Kuantitas atau Jumlah koleksi bahan pustaka yang semakin banyak dan berkualitas
- ❖ Gedung Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang memadai dan letak yang strategis.
- ❖ Tersedianya Gedung Depo Arsip
- ❖ Tersedianya Ruang Audiovisual

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar yang menjadi prioritas adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pembinaan Perpustakaan
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Pelestarian Naskah Kuno
- d. Program Pengelolaan Arsip
- e. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- f. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Ada beberapa kegiatan yang harus tetap ada dalam program prioritas tadi selain kegiatan-kegiatan rutin, yaitu :

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
Untuk meningkatkan minat budaya baca di lingkungan masyarakat Kota Pematang Siantar diperlukan koleksi buku digital/ebook
2. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
Menambah jumlah koleksi buku referensi sesuai dengan usulan para pemustaka dan kebutuhan perkembangan zaman
3. Pengembangan Bahan Pustaka
Menambah koleksi buku bacaan umum Perpustakaan sesuai dengan usulan para pemustaka dan kebutuhan perkembangan zaman
4. Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN
Kurangnya minat pelajar/masyarakat dalam budaya membaca buku mendorong Perpustakaan Daerah langsung menjemput bola ke sekolah-sekolah dan kelurahan dengan menggunakan Mobil Perpustakaan Keliling serta padatnya waktu para pelajar/masyarakat di sekolah/kantor menyebabkan waktu yang terbatas untuk dapat berkunjung ke Perpustakaan Daerah, oleh karena itu Perpustakaan melaksanakan

pelayanan di luar jam dinas (Pukul 16.00 WIB s/d 19.00 WIB) dan di luar hari kerja/sabtu (Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB)

5. Pengembangan, Pengelolaan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan
Tertatanya koleksi naskah kuno yang dilestarikan dan didayagunakan
6. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Tersedianya koleksi Budaya Etnis Nusantara sehingga sangat dibutuhkanya seleksi dan pengadaan koleksi Budaya Etnis Nusantara
7. Pengelolaan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Tertatnya koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan sehingga sangat dibutuhkanya Pengelolaan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
8. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Belum maksimalnya pengelolaan perpustakaan sekolah, kelurahan dan perpustakaan khusus di Kota Pematang Siantar dikarenakan kurangnya pembinaan, penataan dan pendataan dari Melakukan Pengawasan Kearsipan Internal
9. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Belum tertatanya Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, sehingga dibutuhkan Pengawasan Arsip Internal.
10. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Minimnya wawasan Pengelola Arsip dalam memahami instrumen pengawasan kearsipan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, sehingga dibutuhkan Sosialisasi bagi Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar

2.4.Review terhadap RKPD Tahun 2025

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pematang Siantar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Review terhadap RKPD tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar dapat dilihat dalam Tabel T.C.31. berikut ini:

TABEL T-C-31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PEMATANGSIANTAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS AMSIF DAM
PERPUSANTARAAN

Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Aspek Kebijakan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rupa Rakibul (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Volume in Rup (Rp.)	Cat in Rup (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSANTARAAN					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSANTARAAN					
1	Pematangsiantar	Jumlah Perpusantaraan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Didukung	20 perpusantaraan	110.049.328	Perencanaan Perpusantaraan pada Satuan Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten/Kota	Pematangsiantar	Jumlah Perpusantaraan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Didukung	20 perpusantaraan	80.000.000	
		Saluran dengan Standar Nasional			Saluran dengan Standar Nasional		Menyediakan Standar Nasional			
		Perpusantaraan			Perpusantaraan		Perpusantaraan			

2	Pengiriman dan Pengembangan Bahan Perawatan	Pemastangi antar	Jumlah Bahan Perawatan yang dikirim (di) diantaranya untuk Memenuhi Kebutuhan Koneksi Perawatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perawatan Elektronik	Pemastangi antar	Jumlah Layanan Perawatan Elektronik yang Dikembangkan dengan Matriks Layanan TIK	77.500.000	77.500.000	77.500.000	77.500.000	77.500.000
4	Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling	Pemastangi antar	Jumlah layanan perawatan berbasis video untuk meningkatkan kemampuan Kemandirian	98.400.000	98.400.000	98.400.000	98.400.000	98.400.000

1.	Pendanaan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha	Pemasangan antar	Jumlah Uang yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	100 orang	140.000,00	Pendanaan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha	Pemasangan antar	Jumlah Uang yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	10 orang	145.000,00
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pemasangan antar	Jumlah Pemasangan yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	30 orang	37.634,21	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pemasangan antar	Jumlah Pemasangan yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	50 orang	85.000,00
3.	Pengembangan Pengelolaan dan Pemasangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	Pemasangan antar	Jumlah Pemasangan yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	1 orang	41.455,54	Pengembangan Pengelolaan dan Pemasangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	Pemasangan antar	Jumlah Pemasangan yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	1 orang	28.840,81
4.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pemasangan antar	Jumlah Pemasangan yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	1 orang	41.455,54	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pemasangan antar	Jumlah Pemasangan yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	1 orang	28.840,81
5.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pemasangan antar	Jumlah Pemasangan yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	1 orang	41.455,54	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pemasangan antar	Jumlah Pemasangan yang dibayarkan Pengembangan Gerakan Budaya Gemea Nibodha Membuat Tipekal Kebudayaan Koro	1 orang	28.840,81

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5.312,50	4 dokumen	5.312,50	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3.196.421
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	3.252,85	25 orang 14 bulan	6.713	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	3.480.361,352
3	Penyediaan Administrasi Pembiayaan Tugas ASN	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pembiayaan Tugas ASN	83.712,50	17 dokumen	83.712,50	Penyediaan Administrasi Pembiayaan Tugas ASN	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pembiayaan Tugas ASN	125.714,080
4	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD	1.023,88	1 laporan	1.023,88	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD	1.438.203
5	Penyediaan Kelompok Insidasi Lintas Pemasangan Kantor	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Pasi Komposisi Insidasi Lintas Pemasangan Kantor	18.263,70	1 paket	18.263,70	Penyediaan Kelompok Insidasi Lintas Pemasangan Kantor	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Pasi Komposisi Insidasi Lintas Pemasangan Kantor yang Dibekalkan	16.744,570
6	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Pasi Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Dibekalkan	285.842,000	1 paket	285.842,000	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Dinas Kearsifan & Perpustakaan	Jumlah Pasi Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Dibekalkan	250.000,000

7	Penyediaan Pusat dan Rumah Tinggal	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Paket Rumah Tinggal yang Disediakan	1 paket	14.800,7 SD	Penyediaan Pusat dan Rumah Tinggal	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Paket Rumah Tinggal yang Disediakan	1 paket	20.400,02 SD
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	3.550,75 SD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	6.155,640 SD
9	Penyediaan Bahan Logistik dan Pengiriman	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Paket Bahan Logistik dan Pengiriman	2 Paket	17.140,0 SD	Penyediaan Bahan Logistik dan Pengiriman	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Paket Bahan Logistik dan Pengiriman	2 Paket	35.580,14 SD
10	Penyediaan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	Indonesia	Jumlah Laporan Pengembangan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	10 laporan	355.875 SD	Penyediaan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	Indonesia	Jumlah Laporan Pengembangan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	10 laporan	352.210,6 SD
11	Penyediaan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Laporan Pengembangan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	12 laporan	115.250 SD	Penyediaan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Laporan Pengembangan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	12 laporan	21.000,02 SD
12	Penyediaan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Laporan Pengembangan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	12 laporan	154.757 SD	Penyediaan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Laporan Pengembangan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	12 laporan	60.680,20 SD
13	Penyediaan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Laporan Pengembangan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	1 laporan	8.268,75 SD	Penyediaan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	Dasar Kecamatan & Perangkat an	Jumlah Laporan Pengembangan Rakit Kandang dan Kandang SDPD	1 laporan	15.526,25 SD

1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Usaha Kantor	Dinas Keangsaan & Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelidikan Hasil Penelitian Usaha Kantor yang Disiapkan	12 laporan	275.525,9 50	Penyediaan Jasa Pelayanan Usaha Kantor	Dinas Keangsaan & Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelidikan Hasil Penelitian Usaha Kantor yang Disiapkan	12 laporan	267.200,0 50
1 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baga Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbantukan atau Kontribusi Dinas Jabatan	Dinas Keangsaan & Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelidikan Hasil Penelitian Usaha Kantor yang Disiapkan	3 unit	40.822,5 50	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baga Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbantukan atau Kontribusi Dinas Jabatan	Dinas Keangsaan & Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelidikan Hasil Penelitian Usaha Kantor yang Disiapkan	3 unit	68.940,00 0
1 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baga Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kontribusi Dinas Jabatan	Dinas Keangsaan & Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelidikan Hasil Penelitian Usaha Kantor yang Disiapkan	3 unit	44.150,0 50	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baga Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kontribusi Dinas Jabatan	Dinas Keangsaan & Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelidikan Hasil Penelitian Usaha Kantor yang Disiapkan	3 unit	91.740,00 0
1 7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baga Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kontribusi Dinas Jabatan	Dinas Keangsaan & Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelidikan Hasil Penelitian Usaha Kantor yang Disiapkan	1 unit	318.555 200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baga Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kontribusi Dinas Jabatan	Dinas Keangsaan & Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelidikan Hasil Penelitian Usaha Kantor yang Disiapkan	1 unit	150.000,2 00
4	PROGRAM PENGELUARAN ARSIP					PROGRAM PENGELUARAN ARSIP				

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat RT/RW melalui Rambung Warga melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan yang dibawa ke forum Musrenbang Kelurahan.
2. Di Forum Musrenbang Kelurahan menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program/kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan, kemudian usulan tersebut dibawa ke forum Perangkat Daerah, selanjutnya dibahas di Musrenbang Kota agar usulan program/kegiatan yang diusulkan dimasukkan ke dalam Ranja Perangkat Daerah, bersamaan dengan Pokok pikiran (Pokir) dari Anggota DPRD Kota Pematangsiantar.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat/anggota DPRD belum ada yang ditujukan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Tabel T-C 32 ter lampir.

TABEL TC.32:

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

Kota pematangsiantar

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu, kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi aspek koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian lintas OPD, upaya penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang prima.

Penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Ada 2 arah kebijakan nasional pembangunan perpustakaan, yaitu :

1. Meningkatkan budaya gemar membaca
2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses maupun utilitas

Sedangkan kebijakan nasional pembangunan kearsipan meliputi bidang :

1. Pembinaan kearsipan
2. Pengelolaan arsip
3. Pembangunan sistem informasi
4. Pengembangan SDM bidang kearsipan

Fungsi Perpustakaan dan Arsip berbobot sama strategis maupun urgennya sebagai urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan. perpustakaan memiliki fungsi edukatif, informatif, riset kepentingan, rekreatif, penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan, sedangkan kearsipan memiliki fungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, sebagai alat bukti yang autentik, memori kolektif kolektif dan simpul pemersatu bangsa, referensi sejarah, kepentingan riset. Sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut di atas perpustakaan, kearsipan ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas, peradaban modern berkarakter serta pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari KKN melalui upaya penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan secara lebih berkualitas, efisien dan efektif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran, atau implementasi dari pernyataan misi yang dihasilkan. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar, adalah :

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas di bidang Arsip dan Perpustakaan
2. Terwujudnya Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan mencerdaskan masyarakat kota Pematangsiantar
3. Terwujudnya aparatur yang sadar akan pentingnya arsip
4. Meningkatnya jenis perpustakaan di kota Pematangsiantar
5. Meningkatnya sistem pelayanan prima dengan didukung fasilitas yang optimal
6. Meningkatnya sistem pelestarian koleksi perpustakaan dengan didukung fasilitas dan SDM yang memadai
7. Membangun masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri
8. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di bidang kearsipan

Sedangkan sasaran adalah mengacu pada misi yang telah ditetapkan, makasasaran adalah merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas aparatur di bidang arsip dan perpustakaan
2. Tersedianya sarana dan prasarana arsip dan perpustakaan
3. Meningkatnya kesadaran pentingnya arsip bagi aparatur
4. Meningkatnya jumlah perpustakaan
5. Meningkatnya manfaat perpustakaan sekolah, kecamatan/kelurahan, OPD dan Perpustakaan khusus sebagai pusat informasi

6. Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan yang diestarkan
7. Peningkatan minat baca masyarakat, dan meningkatkan jumlah pengunjung, anggota dan peminjam buku pada Perpustakaan Umum daerah
8. Meningkatnya budaya belajar
9. Tersedianya arsip di unit-unit kerja dan tersedianya aparatur yang handal di bidang kearsipan

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024

Program merupakan penjabaran mengenai langkah – langkah yang diambil untuk menjabarkan kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap.

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- a. Program dan kegiatan rutin setiap tahun
- b. Pencapaian visi dan misi Wali Kota
- c. Urusan wajib kearsipan dan perpustakaan berdasarkan UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3.3.2. Garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar Tahun 2025 memiliki 4 Program dan 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
3. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
4. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
5. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
6. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar Masyarakat

- II. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - c. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
 - 7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno
- III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 11. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD
 - g. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 19. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 20. Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 21. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

IV. Program Pengelolaan Arsip

j. Pengelolaan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

26. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

k. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

27. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga

Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Lokasi dalam melaksanakan program/kegiatan lebih banyak berfokus di Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di lingkungan internal, akan tetapi juga menyebar ke sekolah-sekolah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelurahan dan kawasan pemukiman di Kota Pematang Siantar, untuk kegiatan lain di dalam daerah dan ke luar daerah kegiatan berfokus kepada koordinasi dan konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang diinci menurut sumber pendanaannya adalah sebagai berikut :

- APBD Kota Pematang Siantar sebesar **Rp. 6.948.718.513,-**

3.3 Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T.C.33

Daftar Program dan Kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel TC.33 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar, sebagai berikut :

TABEL TC.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

Kode	Uraian/Detail g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan	Indikator Kinerja Program/Kegi- atan	Rencana Tahun 2025				Catatan Pen- ting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutu- han Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Su- mbe r Dan a		Target Capaian Kinerja	Kebutu- han Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN						
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Perputakaan Per tahun (Penduduk Usia 5 - 99 tahun)	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	35,88 %	835.906.996,-	APB D		35,88 %	785.727.899,-
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan tingkat daerah kota Pematangsiantar	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	870.000.000,-	APB D		100 %	479.776.496,-
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Menawarkan Standar Nasional Perpustakaan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5 perpustakaan	65.000.000,-	APB D		200 perpustakaan	126.538.490,-
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditugaskan kapasitasnya	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		0	APB D		88 orang	105.000.000,-

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 dan mendapat bantuan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
2.23.02.2.01.0017	Penyediaan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		8	APB D	1 dekaman	88.238.000,-
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan meliputi: Diakuisisi Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	900 eksan per	185.500.000	APB D	1000 eksan per	102.000.000,-
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TI, Bertasar ISO20000 (ITSM - Information Technology Service Management)	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 perpusat eksan	300.000.000,-	APB D	1 perpusat eksan	51.000.000,-
2.23.02.2.02	Pembudayaan Generasi Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif berbasis pengetahuan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	205.955.400,-	APB D	100 %	205.955.400,-

2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Litterasi Berbasis Inkuisi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inkuisi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	25 perpustakaan	85.000.000,-	APB D	50 perpustakaan	85.000.000,-
2.23.02.2.02.0008	Pembinaan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 orang	185.000.000,-	APB D	200 orang	157.488.480,-
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah Lotus Pembudayaan Program Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	4 lotus	0	APB D	4 lotus	64.485.000,-
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Gesekan Naskah Kuno yang distatisasi atau diolah menjadi digitalisasi atau terdistribusi yang ada di wilayahnya	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5 Naskah	121.848.691,-	APB D	5 Naskah	64.600.000,-
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Muka Daun Kabupaten/Kota	Naskah kuno yang terpelihara dan terjaga	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	121.848.691,-	APB D	100 %	81.600.000,-
2.23.03.2.01.0009	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	50 orang	65.000.000,-	APB D	50 orang	36.000.000,-
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengkajian dan Pengkatalogan Naskah Kuno yang	Jumlah Naskah Kuno yang Didistribusikan Masyarakat yang	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 eksemplar	36.848.801,-	APB D	1 eksemplar	45.000.000,-

	Dorudi dan Masyarakat untuk Diutamakan dan Diselenggarakan	Dikembangkan untuk Diutamakan dan Diselenggarakan						
2.23.02.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditentukan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKotab	Meningkatnya jumlah koleksi budaya etnis nusantara	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		0	APB D	100 %	3.800.000,-
2.23.02.2.02.0004	Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diakukan Pengolahan dan Penyajian	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		0	APB D	270 eksemplar	3.800.000,-
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		3.942.883.912,-	APB D		4.112.373.904,-
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0	3.188.421,-	APB D	0	3.788.128,-
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	3.188.421,-	APB D	100 %	3.788.128,-
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	4 dokumen	3.188.421,-	APB D	4 dokumen	3.788.128,-
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	3.612.883.387,-	APB D	100 %	4.176.153.886,-
2.24.01.2.02.0001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang	DINAS ARSIP DAN	28 orang/14	3.485.031.152,-	APB D	14 bulan	4.043.399.549,-

	ASN	Manajemen dan Turun-tanah ASN	PERPUS AKAAN	bulan					
2.24.01.2 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan « Tugas ASN	DINAS ARSIP DAN PERPUS AKAAN	12 dokumen	125.714. 000,-	APB D		12 bulan	130.714. 000,-
2.24.01.2 02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan « Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DINAS ARSIP DAN PERPUS AKAAN	1 laporan	1.456.28 5,-	APB D		1 laporan	2.320.85 0,-
2.24.01.2 94	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Peningkatan Administrasi Umum	DINAS ARSIP DAN PERPUS AKAAN	100 %	1.309.21 8.664,-	APB D		100 %	962.182. 263,-
2.24.01.2 95.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DINAS ARSIP DAN PERPUS AKAAN	1 paket	16.744.5 70,-	APB D		1 paket	20.258.4 38,-
2.24.01.2 96.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DINAS ARSIP DAN PERPUS AKAAN	2 paket	350.000. 000,-	APB D		2 paket	415.015. 499,-
2.24.01.2 96.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DINAS ARSIP DAN PERPUS AKAAN	1 paket	25.495.9 25,-	APB D		1 paket	15.621.8 38,-
2.24.01.2 96.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	DINAS ARSIP DAN PERPUS AKAAN	1 paket	8.153.84 0,-	APB D		1 paket	4.051.60 0,-

		Ditindakan							
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 paket	55.599.749,-	APB D		2 paket	16.000.000,-
2.24.01.2.06.0009	Penyediaan dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	95 laporan	350.219.890,-	APB D		115 laporan	405.188.750,-
2.24.01.2.06.0010	Penyediaan dan Arsip Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penelaahan arsip daerah pada SKPD	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	12 dokumen	21.000.000,-	APB D		12 dokumen	25.000.000,-
2.24.01.2.06	Penyediaan Jasa Penjangkauan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penjangkauan Pemerintahan Daerah	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	397.325.469,-	APB D		100 %	409.170.000,-
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	12 laporan	65.660.300,-	APB D		12 laporan	104.737.500,-
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 Laporan	15.026.250,-	APB D		1 laporan	15.026.250,-
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	12 laporan	267.220.000,-	APB D		12 laporan	289.400.250,-

2.24.01.2.09	Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	235.580.000,-	APB D	100 persen	245.580.000,-
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperkara dan dibayarkan Pajak	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 unit	66.940.000	APB D	2 unit	66.940.000
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperkara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5 unit	81.740.000,-	APB D	5 unit	81.740.000,-
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkara/Dirawat/dilaki	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1 unit	150.000.000,-	APB D	1 unit	150.000.000,-
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Jumlah Perangkat daerah yang di Tata Arsip Dinamis	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	66 %	375.985.985,-	APB D	75 %	319.985.881,-
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip dinamis yang dikelola	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	185.385.886,-	APB D	100 %	135.183.881,-
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyediaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0	0	APB D	0 berkas	59.000.000,-

2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	33 Laporan	185.000.000,-	APB D	33 laporan	76.103.851,-
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang distorasi	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	8	APB D	100 %	
2.24.02.2.02.0004	Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Didukung Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		0	APB D	32	46.500.000,-
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Keanggotaan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Akses informasi yang lengkap, cepat dan berkualitas	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	100 %	185.000.000,-	APB D	100 %	130.000.000,-
2.24.02.2.03.0002	Pembudayaan Kewajiban Unit Keanggotaan dan Lembaga Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembudayaan Kapasitas Unit Keanggotaan dan Lembaga Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2 laporan	185.000.000,-	APB D	2 laporan	130.000.000,-
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Penyelamatan arsip pemerintahan yang bernilai guna	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		0	APB D		61.818.000,-
2.24.03.3.01	Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Releansi di Bawah 10 (Sepuluh)	Cakupan Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Releansi di	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		0	APB D		61.818.000,-

	Tahun	Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							
2.24.03.2 01.0004	Pembelan, Penetapan dan Pembayaran Aspek yang Membeli Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Aspek yang Dibekukan Pembelan, Penetapan dan Pembayaran Aspek yang Membeli Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	GRAS ARBP DAN PERPUST AKAAN		8	APR 0			81.818.2 00,-
	JUMLAH				8.943.71 8.813,-				8.982.60 8.794,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pematangsiantar, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan Kearsipan dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan Mencerdaskan masyarakat menuju Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar menjalankan dua urusan wajib yaitu urusan kearsipan dan perpustakaan diantaranya :

1. Urusan Perpustakaan
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan
 - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
2. Urusan Kearsipan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Program Pengelolaan Arsip
 - c. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pendanaan indikator sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikator selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai

bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar Tahun 2025 tercantum dalam tabel berikut ini :

No.	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
I	Program Pembinaan Perpustakaan	936.218.078
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	507.139.191
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	84.981.758
	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	82.172.454
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.967.910
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	265.017.069
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	429.078.867
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	245.575.300
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	86.219.187
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus	97.284.400
II	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	64.999.777
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	121.848.601
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	64.999.777
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.323.269.669
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.139.279

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.139.279
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.645.215.902
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.502.554.055
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.060.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.581.847
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	698.585.742
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.926.751
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344.794.077
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.105.287
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.132.920
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.884.707
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.061.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.162.530
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.875.280
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	36.356.250
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.930.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.340.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.640.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.700.000
IV	Program Pengelolaan Arsip	293.826.216
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	156.752.086
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	156.752.086

	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	137.074.150
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	137.074.150
	JUMLAH.....	6.324.487.524

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Arsip dan Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melakukan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan, diantaranya adalah :

- 1) Perlu adanya anggaran khusus dalam rangka peningkatan minat baca, terutama untuk pengolahan perpustakaan (termasuk perpustakaan sekolah, Perpustakaan kelurahan dan sentra – sentra pembelajaran (masyarakat), agar perpustakaan menyediakan buku – buku bacaan yang sesuai dengan perkembangan dan berbagai informasi menarik seperti gambar – gambar, foto dokumentasi, alat peraga, dan informasi lainnya yang menunjang penghimpunan masyarakat (*Life Skills*).
- 2) SDM di Dinas Arsip dan perpustakaan harus ditambah dan diberikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga terkait.
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana kearsipan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah kota Pematang Siantar.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui pengajuan anggaran keuangan tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah - kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

5.3. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Arsip dan Perpustakaan pada tahun 2023 mendatang akan menetapkan 4 program terdiri dari 19 kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana Dinas Arsip dan Perpustakaan tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Pemangkuaster, 2024
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KOTA PEMATANG SIANTAR

NANZAH FANSHURI DAMANIK, S. STP, M.Si
Pemangku
NIP. 19841024 200412 1 001